

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda-beda, seperti anggota legislatif, kreditor, karyawan dan masyarakat umum.

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah merupakan sesuatu yang penting untuk mendapatkan kepastian mengenai keberhasilan atau ketepatan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (APBD/APBN), setiap entitas pelaporan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah kementerian negara/lembaga dan

bendahara umum negara wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja, (Halim, 2007: 180).

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik (baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Mahmudi (2010: 8) menjelaskan fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Oleh karena itu laporan keuangan daerah yang disajikan diharapkan benar-benar harus berkualitas dengan tingkat karakteristik yang memadai. Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut PP No 71 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah (1) Relevan, (2) Andal, (3) dapat Dibandingkan, (4) dapat Dipahami.

Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah meliputi berbagai komponen yang berhubungan yaitu, (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian resiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) monitoring/pemantauan.

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Halim, 2007: 186). Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2010: 20).

Tujuan sistem pengendalian intern yaitu : menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi dua macam: pengendalian

intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administrasi (*intern administrative control*). Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi metode dan ukuran-ukuran dan koordinasikan terutama menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi (Mulyadi 2001 : 163).

Berdasarkan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2014, menurut opini BPK, telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango per 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mampu mempertahankan opini WTP. Akan tetapi berdasar kaji temuan BPK-RI masih terdapat kelemahan dalam laporan keuangan kabupaten bone bolango tahun anggaran 2014, yaitu lemahnya sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap kepatuhan terhadap perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan pertanggungjawaban Kas di Bendahara Pengeluaran belum memadai;
2. Aset Tanah belum disertai bukti kepemilikan dan belum disajikan secara andal;
3. Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum tertib.

Selain itu terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Berdasarkan Siaran Pers BPK RI TA 2012

(5/05/2013) BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango TA 2012 dengan opini "Wajar Dengan Pengecualian". Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango TA 2012, menurut pendapat BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango per 31 Desember 2012, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan terkait penyajian aset tetap per 31 Desember 2013 dan 2011, yaitu terdapat aset tetap yang belum dapat diyakini kewajarannya sebesar. Rp.96.677.501.720,30.

Berdasarkan urian di atas, penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2014) menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 83%. Secara parsial, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi, hanya lingkungan pengendalian, penilaian resiko, dan informasi dan komunikasi yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Firgina (2014) berdasarkan penelitian yang dilakukanya menunjukkan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, Jumiarti (2014) penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango ,

Setiyawati (2013) melakukan penelitian tentang “The effect of Internal Accountants’ Competence, Managers’ Commitment to Organizations and the Implementation of the Internal Control System on the Quality of Financial Reporting” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Internal Manajer 'Komitmen Organisasi dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan secara bersamaan (2) Internal Akuntan Kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas pelaporan keuangan (3) Komitmen Manajer 'dengan Organisasi tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan (4) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan, dan Nur Afiah dan Cahaya Azwari 2015) penelitian tentang “The Effect Of The Implementation Of Government Internal Control System (GICS) On The Quality Of Financial Reporting Of The Local Government And Its Impact On The Principles Of Good Governance: A Research In District, City, And Province Government In South Sumatra”, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa melalui kualitas pelaporan keuangan, pengendalian internal memberikan dampak yang lebih baik, signifikan, dan berpengaruh positif terhadap pemerintahan yang baik.

Berdasarkan urian latar belakang di atas peneliti tertarik mengambil judul tentang “ **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango**”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Masih terdapat kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan kabupaten bone bolango.

2. Masih terdapat kelemahan sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan kabupaten bone bolango.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa Besar pengaruh sistem pengendalian intern berupa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan secara parsial terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern berupa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan secara simultan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang,identifikasi masalah, dan rumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern berupa berupa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan secara parsial terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern berupa berupa lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan secara simultan terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu ekonomi akuntansi, khususnya menyangkut Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan.
2. Sebagai bahan acuan/referensi bagi penelitian sejenis atau yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

1.5.2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi Kabupaten Bone Bolango dalam meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap Kualitas laporan keuangan.